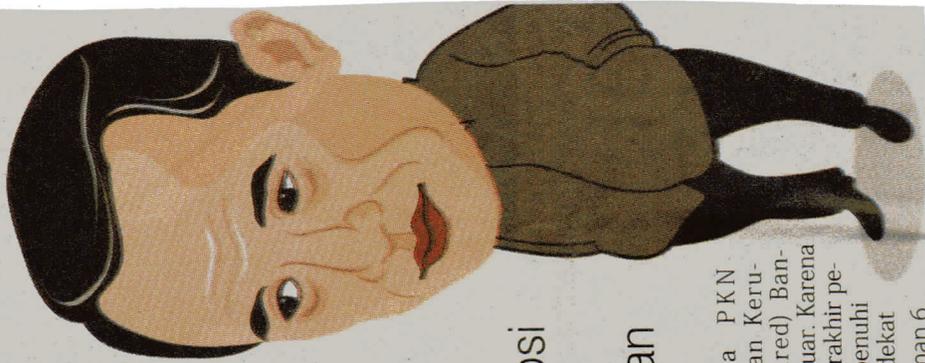




Kasus Lawas Bansos KONI Kalbar 2006-2008 Segera Bergulir

KE KPK



Calon Tersangkanya
Sedang Myalon
Kejati Kalbar Sikapi
Sprindik dari Polda

PONTIANAK-RK. Kasus lawas, dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Kalbar tahun 2006-2008, tampaknya segera memasuki

fase final. Kemarin, Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar memastikan, dalam waktu dekat, hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut dirampungkan

Dugaan Kasus Korupsi
Serawai-Ambalau,
Tersangkanya Askiman

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar.

Tak cukup sampai di situ, pada Sabtu 12 April 2014 pekan lalu, Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) alias Sprindik pun sudah diterima Kejaksaan

Tinggi Kalbar. "Namanya PKN (Penghitungan Kerugian Negara, red) Bansos segera keluar. Karena permintaan terakhir penyidik bisa dipenuhi dalam waktu dekat

■ Halaman 6



Kasus Lawas Bansosdari halaman 1

ini," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Drs Widodo, melalui Kasubdiv Tipikor-nya, Kompol Permadi Syahid Putra Slk, di ruang kerjanya, Senin (14/4).

Jamak diberitakan sebelumnya, dugaan penyimpangan Bansos tersebut terjadi di tubuh Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Kalbar, tahun 2006-2008 yang diduga melibatkan dua mantan pejabat tinggi Provinsi Kalbar. Yakni, bekas Gubernur Kalbar, Usman Djafar, dan bekas Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Zulfadli.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK segera diketahui. Kalau hasil kerugian sudah keluar tinggal ekspose, dikirim ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) baru kita panggil tersangkanya," tegas Permadi.

Dan, menurut dia, berdasarkan eskpose terakhir kasus tersebut, ada beberapa penambahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Selaku penyidik, kami merasa dapat memenuhinya," ujar Permadi.

Kedua tersangka yang dimaksud, hingga kini, masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan kembali maju dalam Pemilu Legislatif 2014, 9 April 2014 lalu. Namun, kata Permadi, keduanya belum pernah diperiksa dengan status sebagai tersangka.

"Terungkapnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008," jelasnya.

BPK Perwakilan Kalbar sendiri, dalam pemberitaan yang sudah-sudah, telah memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Mereka tidak meyakini beberapa kelompok pengguna anggaran. BPK Perwakilan Kalbar juga telah membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu (PDTT) dan hasilnya memang mengindikasikan adanya kerugian negara berupa empat penggunaan Bansos bermasalah.

Kejanggalan yang didapat BPK, antara lain, temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Dana tersebut diduga untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar sebesar Rp10,07 miliar.

Kemudian, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar, kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar. Tak luput ditemukan pula ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009, indikasi kerugian daerah mencapai Rp2,114 miliar.

Terpisah, pada pekan lalu, Aspidus Kejaksaaan Tinggi Kalbar, Didik Istiyanta juga menyatakan, Polda Kalbar telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) alias Sprindik ke Kejaksaaan Tinggi Kalbar. "Ada lima SPDP dari Polda Kalbar ke Kejati Kalbar, salah satunya Bansos provinsi Kalbar," kata Didik kepada wartawan, Sabtu (12/4).

Dia menyatakan, pemeriksaan pun telah dilakukan terhadap beberapa orang saksi yang masuk dalam item korupsi Bansos tahun anggaran 2006 - 2008 dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 22,14 miliar itu. Salah seorang saksi adalah bendahara nonaktif KONI Kalbar, Iswanto, yang telah merugikan negara Rp2,1 miliar. Iswanto sendiri kini telah mendekam dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Pontianak.

Target Polda, 30 Kasus Dugaan Korupsi Kelar Tahun Ini

Kasubdiv Tipikor Reskrimsus Polda Kalbar, Kompol Permadi

Syahid Putra selanjutnya menambahkan, tahun ini pihaknya harus menyelesaikan target penanganan yang telah ditentukan, yakni sebanyak 30 kasus.

Kasus lain yang sedang ditangani divisinya saat ini ada 14 laporan polisi. Diantaranya, kasus pengadaan bibit Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sanggau dan peningkatan jaringan irigasi sumber daya air di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dengan PKN sebesar Rp1,09 miliar. Kemudian, kasus pengadaan satelit oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalbar dengan total anggaran Rp6,2 miliar.

Ada juga Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar menggunakan dana APBN tahun anggaran 2010/2011, masing-masing Rp100 juta dan Rp600 juta, dengan tersangka pimpinan perusahaan yang menangani, Direktur PT Teknik Jaya Mandala, Muhammad Asyur, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Didik Heriyanto.

Kasus anyar lain yang tengah digarap Polda terjadi di Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Kecamatan Serawai-Ambalau, Kabupaten Sintang. Posisi penanganan kasus tersebut kini dalam tahap melengkapi berkas. Hasil penghitungan kerugian negara (PKN) sudah selesai, dengan total Rp5,7 miliar.

"Hampir total anggaran dikorupsi. Karena totalnya ada Rp6 miliar, hampir los. Proyek ini swakelola. Tersangka mantan kepala Dinas PU Sintang, Askiman. Pelaksana teknis pekerjaan, Ramadhan. Secepatnya akan kita panggil. Daerah lainnya masih dalam proses lidik, semua daerah termasuk Kubu Raya dan lainnya," pungkas Permadi.

Laporan: Andreas
Editor: Mohamad iQbal